

ABSTRAK

Implementasi kebijakan *E-Government* melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengaktifkan aplikasi IKD, kurang meratanya transparansi informasi tentang aplikasi tersebut, serta kendala dalam aspek komunikasi, sumber daya manusia, disposisi petugas, dan struktur birokrasi yang masih kurang efektif. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan *E-Government* melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menitik beratkan pada empat faktor utama dalam keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian mencakup pejabat Dinas Dukcapil, staf pelaksana, dan masyarakat pengguna aplikasi IKD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD masih rendah dengan hanya sekitar 21.625 orang dari total penduduk 641.007 jiwa yang telah melakukan aktivasi, sedangkan lebih dari 408 ribu belum mengaktifkan aplikasi ini. Transparansi informasi telah dilakukan lewat media sosial dan sosialisasi langsung di kecamatan dan sekolah, namun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal. Kendala utama yang dihadapi berupa komunikasi yang belum merata kepada masyarakat terutama di desa terpencil, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, sikap sebagian petugas yang belum konsisten dan masih terdapat birokrasi yang belum optimal serta koordinasi yang perlu ditingkatkan. Penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi yang merata dan berkelanjutan, penambahan sumber daya dan fasilitas, serta perbaikan koordinasi birokrasi untuk mendorong keberhasilan implementasi aplikasi IKD di Aceh Utara.

Kata Kunci: *E-Government, Identitas Kependudukan Digital, Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik, Aceh Utara.*

ABSTRACT

Implementation of the e-government policy through the Digital Population Identity (IKD) application at the Population and Civil Registration Office of North Aceh Regency. The main issues identified are the low community participation in activating the IKD application, suboptimal transparency of information dissemination, and obstacles related to communication, human resources, disposition of officers, and bureaucratic structure. The research location includes the Population and Civil Registration Office and several districts and villages within North Aceh. This study aims to analyze the implementation of the e-government policy through the Digital Population Identity (IKD). The theoretical framework applies George C. Edward III's policy implementation model, which highlights four key variables influencing successful policy implementation: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation involving key officials, staff, and community members. Findings reveal that only about 21,625 people from a population of 641,007 have activated the IKD application, leaving over 408 thousand unactivated. Although information transparency efforts have been made through social media and direct outreach in districts and schools, coverage remains uneven. Major challenges include inadequate communication to remote communities, limited human and infrastructural resources, inconsistent attitudes among some officers, and bureaucratic inefficiencies. The study recommends enhancing comprehensive and continuous socialization, augmenting staffing and facilities, and improving coordination within the bureaucracy to foster effective implementation of the IKD application.

Keywords: E-Government, Digital Population Identity, Policy Implementation, Public Service, North Aceh.